

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini berkaitan tentang pariwisata yang mengulas mengenai Kerjasama Model *Pentahelix* dalam Pengembangan Wisata *Haritage* Kajoetangan di Kota Malang. Karena dalam hal ini tugas pemerintah dan non pemerintah yaitu sebagai salah satu aktor yang melakukan perubahan dalam hal pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yaitu salah satunya di bidang sektor pariwisata. Berikut ini akan dijelaskan penulis terkait beberapa teori, konsep serta penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai acuan dasar dalam menganalisis hasil pembahasan.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan dan mengambil penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang berkaitan dengan *pentahelix* dan *collaborative Ggovernance*.

Berdasarkan hasil penelitian Dimas Lucito Chusuma dalam penelitian yang berjudul “Collaborative Governance (Studi tentang Kolaborasi antar *Stakeholder* dalam pengembangan kawasan minapolitan di kawasan

Sidowarjo)”¹. Tidak adanya pusat pengembangan minapolitian (PPM) sebagai tempat berkumpul para stakeholder dan kurang interaksi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor utama terdorongnya penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* dari Amason dan Nabachi dimana peneliti ingin melihat proses kolaborasi pengembangan minapolitian yang disesuaikan dengan komponen kolaborasi krik Amason. berdasarkan kesimpulan yang ditarik proses kolaborasi dimulai dari prinsip bersama, motivasi bersama dan kapasitas dalam melakukan tindakan kolaborasi sudah dilakukan dalam proses kolaborasi Minapolitian ini walaupun masih ada kendala dengan kurangnya *stakeholders* dan interaksi antar *stakeholders*. Kegiatan kolaborasi dapat dilihat dari pembagian kersama antar *stakeholder* yang terlibat, pemerintah sebagai fasilitator, pendampingan, swasta melakukan pelatihan dan koordinasi terkait fasilitas pengembangan kawasan Minapolitian sedangkan pihak masyarakat dan kelompok usaha bersama pengembangan kawasan minapolitian melalui usaha peningkatan produktivitas perikanan dan kelautan sesuai arahan pemerintah.

Penelitian oleh Sulung Satrio Ilham dengan judul “Model Collaborative Governance Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Batu”². Penelitian ini juga menggunakan Teori *Collaborative Governance* Amason dan Nabach. Intisari dari penelitian ini yaitu peneliti melihat dan membahas lebih terperinci mengenai keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup, komonitas Bank sampah dan Komonitas relawan cinta lingkungan (RCL) dalam proses kolaborasi pengelolaan sampah yang dalam prosesnya disesuaikan dengan

¹Lucito, Dimas. 2016 .*Collaborative Governance antar Stakeholder dalam pengembangan kawasan minapolitian di kawasan Sidowarjo*. Skripsi Thesis : Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik. Universitas Airlanga : Surabaya

²Ilham, Sulung. 2018. *Model Collaborative Governance Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Batu*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik. Universitas Muhammadiyah : Malang

proses kolaborasi Amaron yang mencangkup dinamika kolaborasi, kegiatan kolaborasi hingga hasil akhir dari kolaborasi tersebut. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa proses kerjasama yang dilakukan ketiga stakeholders yang terlibat sudah cukup bagus, hal ini karena mulai dari kegiatan pelatihan, pengelolaan, serta pengesahan ketiga stakeholders tersebut ikut terlibat didalamnya.

Penelitian selanjutnya oleh Sumito syawal dan sulemen Samuda tentang “Dinamika Collaborative Governance dalam Wisata Legugam Sebagai Wisata Kultural Kota Ternate”.³ Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dinamika proses *collaborative governance* dalam pelaksanaan *Legu Gam* sebagai wisata kultural Kota Ternate, dimana proses kolaborasi melibatkan *multi-stakeholder* sesuai dengan kapasitas, motivasi dan sejauhmana keterlibatan mulai dari proses perencanaan dan implementasi dari masing-masing *stakeholders*. Pada penelitian ini Dinamika *collaborative governance* dalam pelaksanaan festival *Legu Gam* yang dilakukan oleh Pihak yang berkepentingan yang kemudian yang ditandai dengan pembentukan forum kolaborasi yakni panitia festival *Legu Gam* adanya forum kolaborasi menunjukkan bahwa keterwakilan dalam proses kolaborasi tidak sebatas simbolis melainkan penegasan secara substansi keterwakilan pada proses kolaborasi. Dimana forum kolaborasi berperan sebagai instrumen untuk merumuskan bentuk, jenis kegiatan dan strategi pencapaian serta pengambilan keputusan dan keputusan bersama diambil berdasarkan proses raat atau musyawarah dalam forum tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian Handy, Alexander dan Yudithia dengan judul “Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix dalam rangka mengembangkan potensi Pariwisata di Jawa Timur serta meningkatkan perekonomian

³Syawal, Sumito, dan Samuda, Sulemen. tentang 2017 . Dinamika Collaborative Governance dalam Wisata Legugam Sebagai Wisata Kultural Kota Ternate. Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara. Vol 5 No 22. Hal 145-167

domestik”⁴. Intisari dari penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana Implementasi kolaborasi model Penta Helix dalam rangka meningkatkan potensi pariwisata di Jawa Timur sehingga hasil yang didapat dalam penelitian ini dapat memunculkan strategi yang tepat dalam rangka memaksimalkan dan mengembangkan potensi pariwisata di Jawa Timur yang mampu mendukung perekonomian domestik. pembahasan Kolaborasi Model Penta Helix dalam penelitian ini dilihat dari penjelasan keterlibatan lima stakeholder yaitu wartawan, komunitas pencinta wisata, pengusaha travel, akademi dan instansi pemerintah provinsi maupun daerah dalam bekerjasama sama menggali dan mengembangkan potensi wisata yang dimiliki. kelima stakeholders yang terlibat tersebut mempunyai peran penting masing-masing yang nantinya jika digabungkan akan menjadi kolaborasi yang menguntungkan.

Tri Yuniningsi, Titi Darmi dan Susi Sulandari dalam penelitian yang berjudul “Model *Pente Helix* dalam Pengembangan Wisata Kota Semarang”⁵. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan model *pentahelix* dalam pengembangan pariwisata di kota Semarang yang permasalahannya adalah kurang optimalnya kerjasama antar aktor yang terlibat. Teori menggunakan Teori Aktor Kebijakan dan *Model Pentahelix* Arief Yahya. Intisari dari penelitian ini yaitu peneliti menidentifikasi secara rinci aktor-aktor Pente Helix yang terlibat dalam proses kolaborasi tersebut serta melihat lebih detail tentang peran masing-masing aktor Penta Helix secara optimal dan disesuaikan dengan tupoksi masing-masing aktor.

⁴Handy, Alexander dan Yudithia. 2018. Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix dalam rangka mengembangkan potensi Pariwisata di Jawa Timur serta meningkatkan perekonomian domestik. *Jurnal Manajemen Bisnis (Mebis)*. Vol 3 No 1. Hal 31-38

⁵Yuniningsi Tri, Titi Darmi, dan Susi Sulandari. 2019. Model *Pente Helix* dalam Pengembangan Wisata Kota Semarang. *Journal of Publik Sektor Inovasion*. Vol 3 No 2. Hal 84-93

Penelitian yang dilakukan Novy Setia Yunas dengan Judul “Implementasi Konsep *Penta Helix* dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lubung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur”.⁶ Penelitian ini membahas mengenai model inovasi bagi pengembangan potensi desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Provinsi Jawa Timur berupa Lumbung Ekonomi Desa. Dalam penelitian ini dikatakan Perkembangan Potensi desa ini sudah cukup bagus tetapi masih ada hambatan-hambatan yang menjadi menghambat proses pengembangan tersebut. Proses pembangunan dan pengembangan desa tentu membutuhkan inovasi yang tepat agar dapat berjalan maksimal. mulai dari pemetaan dan pendataan, pelatihan pengelolaan potensi desa hingga digitalisasi ekonomi perdesaan bagi dalam pemasaran potensi yang telah dikelola yang tentunya melibatkan stakeholder yang terlibat. maka dari itu untuk mewujudkan tatanan yang maksimal peneliti mendorong sebuah Inovasi yaitu dengan menggunakan Konsep *Penta Helix* yang melibatkan 5 (lima) linimasa yaitu pemerintah, swasta, media, komunitas dan akademisi. peneliti menyimpulkan bahwa melibatkan Kelima *stakeholder* tersebut dalam pengembangan potensi wisata desa tersebut akan membawa dampak yang baik karena kelima Stakeholders *Penta Helix* mempunyai peran penting masing-masing yang cukup berpengaruh dalam mewujudkan program-program pengembangan potensi desa di Jawa Timur.

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti dibagi menjadi dua kategori yaitu bagian *collaborative governance* dan bagian *pentahelix*, hal ini karena

⁶Yunas, N, Setia. 2019 Implementasi Konsep *Penta Helix* dalam Pengembangan Potensi desa melalui Model Lubung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur. *Matra Pembaharuan Jurnal Inovasi Kebijakan*. Vol 3 No 1. Hal 37-46

peneliti belum menemukan penelitian terdahulu yang membahas mengenai kerjasama model *pentahelix* menggunakan teori *collaborative Governance*. Pada penelitian terdahulu *Collaborative governance* ketiganya menggunakan teori *collaborative* model Amarson yang nabachi yang didalamnya menjelaskan proses kolaborasi mulai dari dinamika kolaborasi. kegiatan hingga hasil dari kolaborasi itu sendiri. sedangkan dalam penelitian yang membahas tentang *pentahelix* sebagian besar *pentahelix* yang dijelaskan yaitu leboh pada Aktor *pentahelix* yang terlibat dan peran masing-masing aktor didalamnya tidak menjelaskan bagaimana proses kerjasama.

2.2 Pengembangan Pariwisata

Pengembangan kawasan wisata merupakan alternatif yang diharapkan mampu mendorong baik potensi ekonomi maupun upaya pelestarian. Pengembangan kawasan wisata dilakukan dengan menata kembali berbagai potensi dan kekayaan alam dan hayati secara terpadu. Selain itu pengembangan pariwisata ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan serta dapat memberikan manfaat terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, dengan mengembangkan sektor pariwisata ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintah terutama dari segi pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah..

Pada dasarnya pengembangan pariwisata adalah suatu proses yang berkesinambungan untuk melakukan *matching* dan *adjustment* yang terus menerus antara sisi *supply* dan *demand* kepariwisataan yang tersedia untuk mencapai misi

yang telah ditentukan.⁷ Hal ini karena selalu terjadi persaingan sektor pariwisata sehingga sewaktu-waktu sektor pariwisata bisa mengalami pemerosotan daya tarik dan daya saing sehingga jarang bisa berakibat fatal, maka dari itu penyesuaian *supply* dan *demand* harus dilakukan terus menerus sesuai dengan tuntutan perkembangan pariwisata.

Menurut konsep pengembangan wilayah pariwisata oleh Yoeti menjelaskan bahwa pengembangan suatu objek wisata harus dapat diciptakan *product style* menyangkut daya tarik, perbedaan dengan objek lainnya, fasilitas wisata, akomodasi transpor dan fasilitas, telekomunikasi, dan sarana pendukung lainnya.⁸ Dengan demikian pengembangan pariwisata dapat berjalan seimbang karena tidak hanya berfokus pada objek tertentu saja tetapi juga sarana pendukung wisata lainnya seperti transportasi, komunikasi, penginapan, dan fasilitas lainnya.

Pengembangan pariwisata memiliki berbagai manfaat yang dapat diperoleh baik oleh masyarakat maupun pemerintah atau *stakeholder* lain. Pentingnya pengembangan pariwisata yang terdapat di suatu daerah bisa berdampak pada perekonomian masyarakat. Apabila daerah mampu mengelola suatu kawasan wisata dengan karakteristik daerah tersebut seperti budaya maka akan menarik minat wisatawan yang ingin untuk berkunjung serta melihat kawasan wisata tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Suwanto yang menyatakan bahwa pengembangan pariwisata memiliki berbagai manfaat baik dari segi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup.⁹ Pengembangan pariwisata dapat menciptakan kegiatan perekonomian baru disuatu daerah melalui penciptakan

⁷Nuryanti, Wiendu, 1994. *Perencanaan Pembangunan Regional dan Kawasan Untuk Kepariwisata Alam*, Makalah Disampaikan Pada Diklat Peningkatan Mutu Profesionalisme Pengelola Obyek dan Daya Tarik Pariwisata, Yogyakarta

⁸ A. Yoeti, Oka. 1990. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Penerbit Angkasa. Bandung. Hal 20

⁹ Suwanto, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta : Andi

lapangan kerja, mendukung pada pembangunan di sektor lain, dan memberikan sumbangsih terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

2.2.1 Unsur-unsur Pengembangan Pariwisata

Sunaryo mengemukakan pengembangan wisata menurut cooper bahwa kerangka pengembangan destinasi pariwisata mengandung tujuan yang sama yang mencakup attraction, amenity, accessibility, ancilliary dan institution¹⁰. adapun unsur pendukung pengembangan pariwisata sebagai berikut :

1) *Attraction* (Atraksi)

Attraction dapat disebut juga sebagai daya tarik utama dalam pariwisata, Merupakan komponen yang signifikan dalam menarik wisatawan. Suatu daerah dapat menjadi tujuan wisata jika kondisinya mendukung untuk dikembangkan menjadi sebuah atraksi wisata dimana terdapat segala sesuatu yang terdapat di daerah wisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah. Sesuatu yang dapat menarik wisatawan meliputi hasil alam ataupun ciptaan manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.¹¹ Daya tarik pertama lebih mengarah pada aspek natural atau alamiah dari objek wisata tersebut, namun pada daya tarik kedua dapat dilakukan

¹⁰Bambang, Sunaryo. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.

¹¹Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-undang no 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Jakarta : Sekretariat Negara

pengembangan melalui pelaksanaan beberapa even atau acara yang dapat menarik wisatawan untuk hadir ke objek wisata tersebut.

2) *Amenity* (Fasilitas)

Amenitas merupakan semua bentuk fasilitas yang memberikan pelayanan bagi para wisatawan untuk segala kebutuhan selama tinggal ataupun berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata. Aspek fasilitas disebut juga sebagai prasarana kepariwisataan atau semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup berkembang serta dapat memberikan pelayanan pada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam.¹² Fasilitas wisata suatu sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh para pengelola wisata untuk kebutuhan para wisatawan, Karena kebutuhan para wisatawan tidak hanya tentang keindahan pesona alamnya ataupun keunikan objek wisata melainkan juga perlunya sarana dan prasarana wisata. Seperti misalnya sarana akomodasi yaitu meliputi sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, komunikasi, tempat hiburan, penginapan/hotel, restoran, bank, toko cinderamata, MCK umum, pusat kesehatan, tempat beribadah, dan lain sebagainya. Ada juga prasarana sosial dan perekonomian. Prasarana sosial yaitu menyangkut hal yang didalamnya terdapat transportasi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan kawasan objek wisata, prasarana komunikasi yang mana sebagai alat untuk mengetahui keberadaan suatu kawasan objek wisata, sedangkan prasarana sosial yaitu mencakup sistem pendidikan yang mana untuk bisa menentukan kualitas dari sumber daya manusianya.

¹² Yoeti, A. Oka. 1990. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Penerbit Angkasa. Bandung. Hal 31.

3) *Accessibility* (Aksesibilitas)

Aksesibilitas dalam pariwisata kaitannya dengan tingkat kemudahan wisatawan untuk mencapai suatu objek wisata. Aksesibilitas suatu hal yang penting juga untuk diperhatikan, mengingat salah satu aspek tersebut dapat memberikan pengaruh yang besar bagi wisatawan. Fasilitas transportasi dalam bidang pariwisata sangat erat kaitannya dengan aksesibilitas, yang mana maksudnya yaitu frekuensi pengguna kendaraan yang dimiliki dapat berpengaruh jarak jauh seolah menjadi dekat. Hal ini dapat mempersingkat waktu. Tentunya hal ini dapat mempersingkat waktu serta tenaga. Beberapa hal yang bisa mempengaruhi aksesibilitas adalah suatu kondisi jalan, jarak tempuh menuju lokasi tujuan, waktu tempuh, jaringan transportasi, tarif angkutan. Maka jika aksesibilitas kurang baik wisatawan akan merasakan hambatan dalam perjalanan atau kunjungan yang dilakukan selama berwisata.

4) *Ancilliary* (Infrastruktur)

Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk dapat mendukung jasa pelayanan dan sebagai fasilitas pendukung. Sehingga pencapaian daya tarik pariwisata tidak dapat dicapai dengan mudah apabila belum terdapat infrastruktur dasar. Sebab pembangunan infrastruktur secara tidak langsung dapat memberikan manfaat (dapat digunakan) bagi penduduk setempat disamping juga sebagai pendukung pengembangan pariwisata. Dalam pembangunan infrastruktur tidak saja menyangkut tentang pembangunan infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, jalan kereta api, dll) namun juga untuk penyediaan saluran air minum, penerangan listrik, serta juga pembuangan limbah. Karena perkembangan

infrastruktur dari suatu daerah wisata yang banyak dinikmati oleh wisatawan harus mengembangkan serta menciptakan suasana yang nyaman dan cocok bagi para wisatawan.

5) *Institution* (Lembaga Terkait)

Unsur ini biasanya disebut dengan kelembagaan yang terkait dengan keberadaan serta peran dari masing-masing unsur dalam mendukung terlaksananya suatu kegiatan pariwisata yang termasuk masyarakat setempat. Lembaga-lembaga terkait dan Masyarakat lokal mempunyai andil besar dalam pengembangan wisata yang ada di daerah mereka hal ini karena merekalah yang akan menyediakan sebagian besar ataupun atraksi sekaligus untuk menentukan produk suatu wisata. Masyarakat lokal inilah yang sudah terlibat dahulu sebelum adanya pengembangan dan perencanaan. Maka dari itu, peran dari masyarakat lokal dan lembaga-lembaga terkait terutama tampak dalam bentuk penyediaan akomodasi dan juga jasa building. Selain itu, biasanya juga menyediakan kearifan lokal budaya yang ada pada setiap daerah.

2.2.2 Model Pengembangan Pariwisata

1) Pengembangan Pariwisata oleh Pemerintah Daerah

Pada hakikatnya pemerintah negara memiliki fungsi untuk mengatur dan bisa melayani. Fungsi pengaturan biasanya dapat dikaitkan pada hakikat negara modern yaitu suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan pada fungsi pelayanan dikaitkan pada hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Dari sini sudah terlihat jelas bahwa pemerintah memiliki peran atau tugas yang dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur ataupun

mengelola masyarakat di dalam suatu negara yang bertujuan untuk menegakkan hukum serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Pitana dan Gayatri mengatakan bahwa pemerintah daerah memiliki beberapa peran untuk mengembangkan pariwisata daerahnya yang meliputi peran sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisor.¹³ Peran motivator menuntut pemerintah untuk memberikan motivasi kepada masyarakat, investor atau pengusaha bidang pariwisata sebagai sasaran utama perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik. Sementara peran fasilitator menuntut pemerintah untuk menyediakan segala fasilitas pendukung program yang akan dilakukan dan mendukung adanya praktek kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta ataupun masyarakat. Sedangkan dalam konteks sebagai dinamisor, pemerintah daerah merupakan salah satu *stakeholder* dalam pembangunan pariwisata yang memiliki peran untuk mensinergikan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta keputusan yang menguntungkan demi perkembangan pariwisata.

Selanjutnya, Yoeti menyebutkan bahwa terdapat tiga hal penting yang dapat mempengaruhi, mengapa dibutuhkan suatu organisasi dalam pariwisata yang efektif pada suatu daerah, yakni terkait aspek kebutuhan suatu daerah untuk pengembangan pariwisata meningkat, aspek pengaturan transportasi dan lalu lintas menuju lokasi wisata, dan semakin pesatnya perkembangan pariwisata di suatu daerah.¹⁴ Pemerintah perlu mengembangkan pariwisata karena pariwisata memiliki potensi pembangunan daerah dan berkontribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Selain itu, perkembangannya pariwisata di suatu daerah menuntut pemerintah untuk melakukan manajemen transportasi yang tepat dan

¹³Pitana, I Gede dan Gayatri. P.G. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi. Hal 85

¹⁴Yoeti, A. Oka. 2001. *Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Angkasa. Hal.187.

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendukung pengembangan pariwisata agar dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi wisatawan. Secara garis besar Pemerintah Daerah khususnya yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki peran lebih besar dalam mengembangkan pariwisata yang ada pada suatu daerah. Lebih spesifiknya yaitu, memberdayakan masyarakat untuk bersama - sama dalam mengembangkan suatu pariwisata yang ada di daerah agar mau bekerjasama dalam pengembangan suatu pariwisata.

2) Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat merupakan suatu strategi pembangunan yang dilakukan di bidang pariwisata. Konsep ini memiliki tujuan untuk melakukan suatu peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata. Sehingga bisa memberikan kemajuan dalam bidang ekonomi dan nantinya masyarakat memiliki kekuatan dalam pengambilan suatu keputusan untuk bisa mengelola dan membangun dibidang pariwisata. Pariwisata berbasis masyarakat merupakan suatu pendekatan pemberdayaan yang meletakkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat penting dalam konteks pembangunan pariwisata.

Pariwisata berbasis masyarakat memang harus memperhatikan bagaimana keterlibatan masyarakat daerah yang merupakan salah satu syarat guna mencapainya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Masyarakat daerah yaitu masyarakat yang mempunyai pengetahuan terhadap lingkungannya atas dasar pengalaman yang dimiliki secara turun temurun. Adanya pengetahuan dari pengalaman tersebut maka masyarakat memiliki kesadaran dalam

mengembangkan berbagai hal yang ramah lingkungan serta bisa diterima secara sosial budaya dan religi.

Menurut Nasikun salah satu strategi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat memiliki ciri yang unik serta beberapa karakteristik yang meliputi keterlibatan masyarakat atau komunitas lokal, lebih menekankan pada peluang untuk pengembangan obyek maupun atraksi wisata, dan pengembangan wisata yang berbasis lingkungan.¹⁵ Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat praktis harus memberikan peran optimal bagi masyarakat dan partisipasi masyarakat secara aktif serta masyarakat tidak hanya menjadi objek atau sasaran semata. Selain itu, masyarakat dapat mengembangkan aspek kultural dan kearifan lokal dalam obyek dan atraksi wisata yang disajikan kepada wisatawan. Lebih lanjut, pariwisata berbasis masyarakat lebih cenderung bersifat ekowisata atau pariwisata yang berbasis memanfaatkan dan melestarikan lingkungan hidup sekitar, sehingga tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan.

Menurut Paturusi karakteristik kepariwisataan berbasis masyarakat terdiri dari sembilan.¹⁶ yaitu: wisata yang berskala kecil, dimiliki oleh anggota atau kelompok masyarakat setempat, sehingga dapat memberi manfaat pada masyarakat setempat, memberikan kesempatan kerja dan peluang ekonomi pada ekonomi setempat, lokasinya tersebar tidak terkonsentrasi di suatu tempat, desain dan kegiatan mencerminkan karakter wilayah setempat, mengedepankan kelestarian wawasan budaya, tidak mematikan industri dan kegiatan lainnya saling

¹⁵ Nasikun. 2000. *Sistem Sosial Budaya*. Jakarta: PT Raha Grafindo Persada. Hlm : 27.

¹⁶ Paturusi, Syamsul Alam. 2008. *Perencanaan Kawasan Pariwisata*. Denpasar : Press UNUD. Hal 48

melengkapi, menawarkan pengalaman yang berkualitas bagi wisatawan dan merupakan kegiatan usaha yang menguntungkan.

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat dikatakan memiliki prinsip yaitu membuka ruang serta peluang yang luas kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi aktif dalam pengembangan pariwisata di daerahnya. Sehingga mereka pun juga ikut mendapatkan dampak positif baik secara ekonomi serta ikut bertanggung jawab secara moral dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya pariwisata. Pariwisata berbasis masyarakat merupakan pariwisata yang melihat aspek keberlanjutan lingkungan dan budaya untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan melalui suatu hubungan seimbang antara wisatawan dan masyarakat daerah setempat dalam industri pariwisata.

Intinya dalam proses suatu pembangunan ataupun pengembangan pariwisata di suatu daerah memerlukan adanya suatu kolaborasi ataupun kerjasama antar pihak sehingga terjalin komunikasi yang baik. Sehingga kepentingan yang ada akan berjalan seimbang dan tidak ada suatu kepentingan di atas kepentingan yang lain. Maka semuanya harus bisa berjalan bersamaan dan tidak ada kepentingan yang harus diabaikan. Dalam suatu kerjasama harus memenuhi prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, efektif serta partisipatif maka dapat terwujud *good governance* dalam suatu proses kerjasama yang dijalankan. Hal ini salah satu alasan penulis mengambil teori *Collaborative Governance* dalam kasus penelitian ini yang mana melibatkan antar stakeholder dalam suatu pengembangan pariwisata.

2.3 Pengertian *Collaborative Governance*

Salah satu bentuk kerjasama dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan atau *governance* yakni disebut konsep *collaborative governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif. Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara *independent*. menurut roucek dan waren kolaborasi berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah suatu proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kolaborasi melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama¹⁷. sedangkan *governance* termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non-pemerintah.¹⁸ Kolaborasi dapat diartikan sebagai kerjasama, interaksi, kompromi oleh beberapa pihak yang terkait baik itu antar aktor, antar organisasi atau antar institusi maupun lembaga kelompok yang juga menerima manfaat dari adanya strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik penerimaan manfaat secara langsung maupun tidak langsung tentunya dalam hal ini semua pihak memiliki tujuan yang sama terkait apa yang mereka ingin capai dalam kolaborasi ataupun kerjasama yang dilakukan

Menurut pendapat Ansell dan Grash “*Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the*

¹⁷Abdulsyani, 2007 . *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.Hal 159

¹⁸ Dwiyanto, Agus. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: UGM Press. Hal 1.

*provision of public goods*¹⁹ *Collaborative Governance* dapat dikatakan sebagai salah satu dari tipe *governance*. Konsep ini menyatakan akan pentingnya suatu kondisi dimana setiap lembaga atau institut terkait bekerja sama berdasarkan pembagian perannya masing-masing dengan cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau masyarakat.

Dari definisi Ansell dan Gash tersebut kemudian dapat dirumuskan menjadi beberapa kata kunci yang menetapkan pada enam karakteristik, yaitu: Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik, peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non-publik Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merujuk kepada aktor-aktor publik, forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama, forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus, kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik.

Karakteristik kolaborasi tersebut tetap menunjukkan bahwa pemerintah sebagai *leading sector*, meski melibatkan aktor non pemerintah. Selain itu, kolaborasi harus dilakukan dalam bentuk formal dan bersifat konsensus serta dilaksnaakan baik dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan, maupun dalam konteks manajemen publik. Disisi lain, Emerson, Nabatchi dan Balogh mencoba mendefinisikan *collaborative governance* dengan lingkup yang lebih

¹⁹Chris Ansell and Alison Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal Public Administration Research and Theory University of California. Hal 554.

luas yaitu melalui sisi administrasi publik, perencanaan, manajemen publik dan manajemen lingkungan.

Menurut Emerson, Nabatchi dan Balogh proses dan struktur kebijakan publik dalam membuat keputusan dan manajemen mengikutsertakan orang secara konstruktif dan melewati batasan batasan lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan/atau publik, swasta dan lingkungan kewarganegaraan. Hal ini tidak membatasi *collaborative governance* untuk hanya melibatkan pemerintah dan aktor *non-state* (bukan pemerintah) dan bisa juga dalam bentuk kerjasama antar pemerintah atau *multi-partner governance*.²⁰ *Collaborative Governance* juga memungkinkan adanya keterlibatan atau partisipasi *civili society* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dari paparan definisi konseptual menurut para ahli tentang *collaborative governance* diatas dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* adalah Proses kerjasama atau kolaborasi yang didalamnya terdapat keterlibatan state aktor (pemerintah) dan *non-state* aktor (swasta, lembaga masyarakat ataupun institusi non-pemerintah lainnya) yang memiliki kepentingan masing-masing secara bersama sama turut serta dalam proses pembuatan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang mana pihak pihak tersebut akan saling mengisi satu sama lain untuk menjawab kelemahan sistem pemerintahan sebelumnya yang dapat dikategorikan tradisional dan kurang efektif.

²⁰Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh.2012. *An Integrative Framework for Collaborative Governance.*”*Journal of Public Administration Research and Theory* Vol 22 No 1 Hal 3

2.3.1 Latar Belakang Kemunculan *Collaborative Governance*

Kolaborasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan merupakan sesuatu hal yang memang diperlukan dalam praktek pemerintahan saat ini. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi munculnya kolaborasi pada setiap lembaga ataupun institusi terkait. Pada dasarnya proses *collaborative governnace* tidak muncul begitu saja, sebab hal tersebut ada disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya koordinasi ataupun kerjasama dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh publik. Tentu dalam proses *Collaborasi Governance* tidak secara tiba-tiba diterapkan begitu saja hal ini pasti mempunyai latar belakang didalamnya yang akhirnya memberi inisiasi bagi pemerintah dan aktor-aktor terkait sehingga menciptakan kerjasama yang mempunyai tujuan yang sama pula.

Collaborative governance merupakan salah satu terma atau konsep yang dewasa ini menjadi suatu kajian penting dan menarik dalam konteks studi ilmu pemerintahan. Kompleksitas perkembangan, kondisi, dan tantangan yang dialami pemerintah menuntut dilaksanakannya konsep yang memadahi adanya inetgrasi beberapa *stakeholder* yang secara bersama-sama melakukan kerjasama atau kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Anshell dan Grash menyatakan bahwa konsep *collaborative governancemerupakan respon terhadap kegagalan-kegagalan yang dialami oleh pemerintah seperti kegagalan dalam hal implementasi dan munculnya politisasi suatu kebijakan akibat dominasi aktor tunggal dalam perumusannya.*²¹ Sementara itu, Emerson dan Nabatchi secara lebih spesifik mengidentifikasibahwa ada dua faktor utama yang menjadi tuntutan

²¹Ansell, Chriss dan Alison Gash. 2007. *Collaborative governance in theory and practice*. Journal of Public Administration Research and Theory. Hal 544

dan kebutuhan bagi pemerintah untuk melaksanakan konsep *collaborative governance*, yaitu *wicked problem* atau permasalahan besar yang dialami pemerintah dan adanya pergeseran paradigma dari *government* menuju *governance*.²²

Pelaksanaan *collaborative governance* memiliki beberapa tujuan yang dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah, Swasta maupun masyarakat. Kolaborasi dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan urusan publik yang bersifat kompleks, solusi bagi kegagalan implementasi kebijakan, efisiensi anggaran, mampu memobilisasi kepentingan politik tiap aktor dan meredam adanya konflik antar kelompok kepentingan yang terkadang sulit diredam.²³ Dengan kata lain, kolaborasi dilakukan karena kompleksitas adanya saling ketergantungan dari tiap institusi dalam pencapaian kepentingan tertentu Sehingga dengan dilakukannya kolaborasi dapat memobilisasi kelompok-kelompok kepentingan. sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan atau keterbatasan kemampuan dana tiap lembaga untuk melakukan program/kegiatannya sendiri sehingga dengan adanya kolaborasi anggaran tidak hanya berasal dari satu lembaga saja, tetapi lembaga lain yang terlibat dalam kolaborasi.

Selain itu, kolaborasi juga muncul lantaran Kolaborasi pun juga bisa dikatakan sebagai aspek perkembangan dari ilmu pemerintahan, terutama dengan munculnya konsep *governance* yang menekankan keterlibatan beberapa aktor seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Kolaborasi juga dapat sebagai alternatif dalam mengembangkan keterlibatan

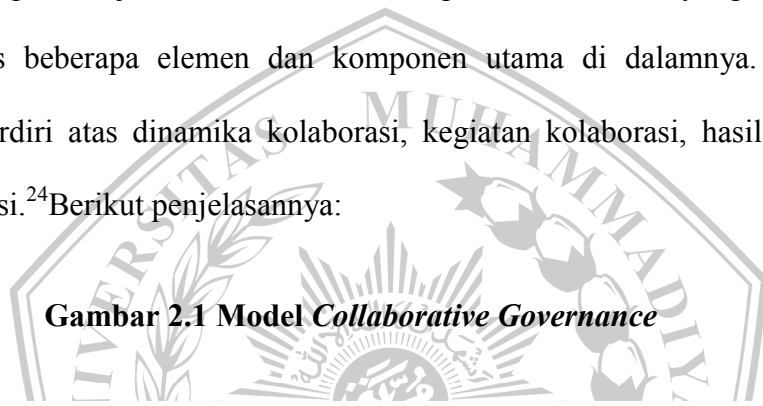
²²Emerson, Kirk dan Tina Nabatchi. 2015. *Collaborative Governance Regime*. Washington: Georgetown University. Hal 5

²³Junaedi. 2015. *Collaborative Governance* dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjung Pinang. Jurnal FISIP. Universitas Maritim Raja Ali Haji.

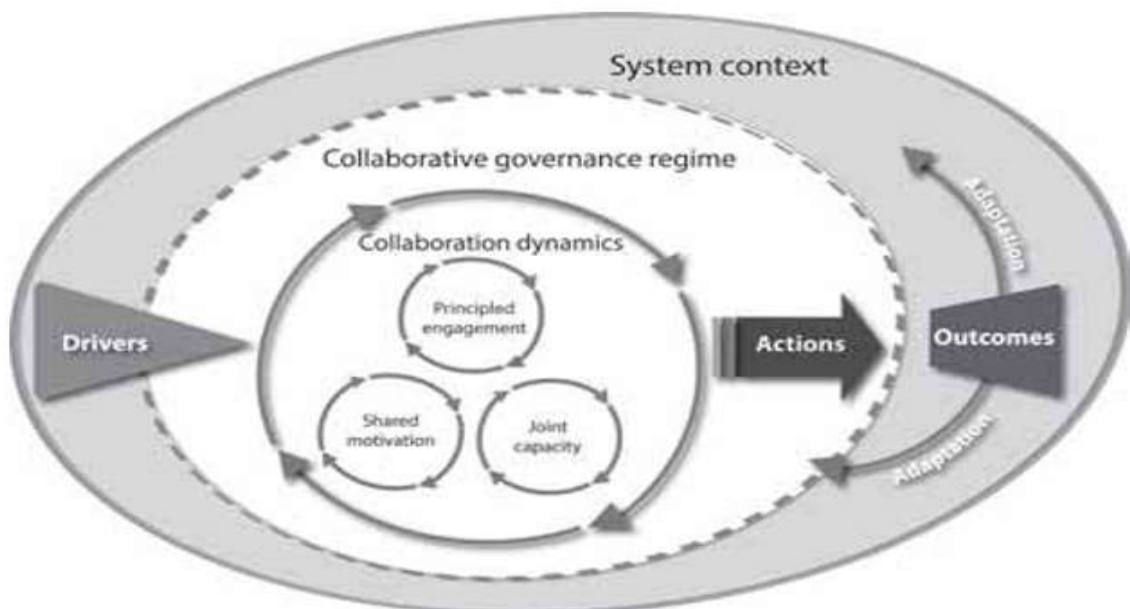
kelompok kepentingan dan adanya kegagalan dalam manajerialisme salah satu institusi atau organisasi.

2.3.2 Model *Collaborative Governance*

Proses kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dalam beberapa tahapan dan komponen yang disebut *integrative framework of collaborative governance* atau kerangka kerja dalam suatu kolaborasi. Kerangka kerja ini dapat menjadi suatu model dalam proses kolaborasi yang di dalamnya terdiri atas beberapa elemen dan komponen utama di dalamnya. Komponen tersebut terdiri atas dinamika kolaborasi, kegiatan kolaborasi, hasil kolaborasi, dan adaptasi.²⁴Berikut penjelasannya:



Gambar 2.1 Model *Collaborative Governance*



Sumber : Emerson dan Nabatchi, 2015

²⁴ Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh. 2012. An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory* Vol 22 No 1 Hal 27

1) Dinamika Kolaborasi

Dalam Proses Kolaborasi Dinamika menjadi komponen Pusat yang dapat dikatakan sebagai bagian paling penting didalamnya. Proses kolaborasi dan dinamika yang terjadi dari waktu ke waktu pada setiap proses Collaborative Governance yang didalamnya terdapat tiga komponen utama yaitu: keterlibatan berprinsip bersama, motivasi bersama dan kapasitas untuk aksi bersama. Komponen-komponen ini dengan elemen masing-masing memperkuat atau melemahkan satu sama lain melalui siklus berulang. Hal ini karena dalam tahapan ini dilangsungkan proses interaksi antar pihak yang berpartisipasi dalam kolaborasi. Kolaborasi yang dilakukan oleh beberapa *stakeholder* atau organisasi perlu mempertimbangkan beberapa komponen yang termasuk dalam aspek dinamika kolaborasi. berikut ketiga unsur penting dalam Dinamika kolaborasi :

a. Pergerakan Prinsip Bersama

Komponen prinsip bersama (*principle engagement*) adalah proses keterlibatan awal yaitu keterlibatan pemangka kepentingan. Hal ini melibatkan dialog secara langsung melalui tatap muka maupun perantara teknologi yang dilakukan antar tiap *stakeholder* yang terlibat dalam proses kolaborasi yang didalamnya terdapat kembali penegasan tujuan kerjasama, pembentukan dan penetapan prinsip-prinsip bersama, oleh karena itu penyatuan prinsip merupakan inti dari kolaborasi tersebut.²⁵ Karakteristik masing-masing aktor merupakan elemen penting yang mempengaruhi seberapa baik prinsip bersama berjalan, proses pertemuan para partisipan dalam dialog diharapkan untuk tidak semakin mempertajam konflik antar partisipan. Karena setiap partisipan memiliki dan

²⁵ibid. Hal 10

membawa karakter organisasi masing-masing.. Adanya dialog dan pertemuan secara langsung antar tiap *stakeholder* dapat menentukan tujuan dan visi bersama dengan melepas batas-batas intitusi atau organisasi yang terlibat.

b. Motivasi Bersama

Emerson, Nabatchi & Balogh mengartikan motivasi bersama sebagai “*self-reinforcing cycle consisting of four elements: mutual trust, understanding, internal legitimacy, and commitment*”, atau motivasi bersama merupakan penguatan siklus yang terdiri dari elemen kepercayaanbersama, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen.²⁶ *Share motivation* merupakan komponen selanjutnya setelah proses penyatuan prinsip bersama melalui proses dialog dan tatap muka antar tiap partisipan atau *stakeholder*. Dalam proses ini *stakeholder* yang terlibat harus saling membangun kepercayaan, saling pengertian dan pemahaman satu dengan yang lain, dan komitmen bersama.

Ketika tiap *stakeholder* saling memiliki kepercayaan maka akan terbentuk situasi dimana adanya saling kesepahaman antar *stakeholder*. Selain itu, komitmen pada proses kolaborasi sangatlah penting dalam proses ini. *Stakeholder* yang berkolaborasi haruslah memiliki komitmen yang tinggi dan *responsibel* dalam melaksanakan kolaborasi. Didalam motivasi bersama, Kepercayaan bersama pada kolaborasi, ditemukan adanya beragaman faktor yang secara langsung maupun tidak langsung membentuk kepercayaan. Terdapat hubungan saling tergantung dari masing-masing aktor kolaborasi, sehingga membuat kepercayaan bersama terbentuk.

²⁶Ibid Hal 13

c. Kapasitas bersama

Capacity for Joint Actions sebagai aktivitas atau kegiatan kerjasama berbagai hasil dari elemen-elemen lintas fungsional untuk menghasilkan tindakan yang efektif karena didalamnya terdapat kapasitas atau kemampuan yang memadai dari masing-masing *stakeholder* yang terlibat untuk mencapai tujuan bersama. Kapasitas ini merupakan kombinasi dari empat elemen penting yaitu prosedural dan kesepakatan yang dilakukan institusi, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya.²⁷ Aspek prosedural dan kesepakatan institusi merupakan aturan yang bersifat formal maupun informal, protocol, pola institusi dan dimensi structural lainnya yang penting dalam pelaksanaan kolaborasi. Aspek ini harus dipatuhi oleh setiap partisipan atau *stakeholder* dalam kolaborasi.

Aspek selanjutnya yaitu pentingnya *leadership* atau kepemimpinan dari tiap *stakeholder* yang terlibat. Pelaksanaan kolaborasi sangat dipengaruhi sosok pemimpin yang tepat dan kompeten. Pengetahuan juga menjadi kapasitas yang penting dalam proses kolaborasi. *Stakeholder* yang terlibat haruslah pihak yang memiliki kemampuan tepat dibidang tersebut, sehingga proses kolaborasi dapat berjalan sesuai dengan harapan. Sedangkan yang dimaksudkan kapasitas sumberdaya dapat berupa sumber daya anggaran, sumberdaya manusia, dan fasilitas atau teknologi yang tersedia. Kapasitas dalam melakukan tindakan bersama dapat dikatakan sebagai hasil dari interaksi pergerakan prinsip bersama dan motivasi bersama, namun perkembangan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama juga dapat memperkuat motivasi bersama dan pergerakan prinsip bersama yang memastikan tindakan kolaborasi yang lebih afektif.

²⁷ Ibid Hal 14

2) Kegiatan Kolaborasi

Kegiatan kolaborasi adalah Tindakan langsung yang merupakan cerminan daripada dinamika kolaborasi dalam prakteknya sangat beragam tergantung pada konteks tertentu. Kegiatan kolaborasi dapat berupa pembuatan perencanaan strategis, sumber daya, menetapkan suatu kebijakan, khususnya mengenai kebutuhan sumber daya anggaran dan fasilitas, pelaksanaan kebijakan atau program dan proses monitoring kemudian hasil dari tindakan itu membawa dampak sementara dan secara langsung mengarah kembali pada dinamika kolaborasi.²⁸ kegiatan kolaborasi sendiri ada yang memiliki tujuan luas dan ada pula yang sempit sesuai dengan kesepakatan bersama. kegiatan kolaborasi dapat bersifat kolektif dan satu intituti atau organisasi saja yang melaksanakan. ada yang dapat dilakukan oleh seluruh *stakeholders* dan ada pula hanya dilakukan *stakeholder* tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing *stakeholders* Akan tetapi, kegiatan tersebut tetap tergolong dalam proses kolaborasi.

3) Hasil Kolaborasi

Emerson dan Nabatchi lebih menekankan bahwa hasil suatu proses kolaborasi dapat berupa adanya perubuhan kualitas dan kuantitas dari segi fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik. Hasil yang didapat merupakan implikasi dari kegiatan kolaborasi yang telah dilakukan yang mana memiliki sumbangsih pada kondisi sosial masyarakat, ekonomi, lingkungan sekitar, ataupun aspek legitimasi politik dari masyarakat terhadap pemerintah. hasil kolaborasi merupakan implikasi dari *output* atau kegiatan kolaborasi yang telah dilakukan.

²⁸ Ibid Hal 17

4) Adaptasi

Adaptasi merupakan proses akhir dari proses Kolaborasi ini, komponen ini dapat dikatakan kurang begitu menonjol dalam pengelolaan kolaboratif. Akan tetapi, akan menjadi penting untuk konsep ini yang digunakan dalam rangka memahami kinerja kolaborasi. Dengan harapan kedepannya akan ada perubahan yang transformatif atau bahkan perubahan kecil, namun signifikan dalam merespon hasil dari kegiatan kolaborasi.²⁹ Adaptasi merupakan proses evaluasi yang dilakukan dalam keseluruhan kerangka kerja pengelolaan kolaboratif. Adaptasi dapat diharapkan menjadi masukan penting untuk jalannya praktik atau pelaksanaan kolaborasi ke depannya.

2.4 Kolaborasi Model Pentahelix

2.4.1 Latar Belakang dan Pengertian Perkembangan Pentahelix

Penta helix merupakan perluasan dari strategi *triple helix* dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat maupun lembaga-lembaga non profit dalam rangka mewujudkan inovasi.³⁰ Melalui kolaborasi sinergis tersebut diharapkan terwujud suatu inovasi yang didukung oleh berbagai sumberdaya yang berinteraksi secara sinergis. *Triple Helix* diperkenalkan pertamakali pada tahun 1995, Etzkowitz dan Leydesdorff memperkenalkan model Triple Helix dengan unsur Academics, Business Sector, dan Government.³¹ Aktor yang bertanggung jawab untuk menciptakan inovasi adalah bidang Industri. Aktor yang bertanggung

²⁹ Ibid Hal 19

³⁰Lindmark, A., Stuesson, E., & Roos, M.N. (2009). *Difficulties of Collaboration for Innovation*. Lund University

³¹Etzkowitz, H. & Leydesdorff, L. 1995. The Triple Helix. University-Industry-Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development. *EASST Review*, 14(1), pp. 14-19, 1995.

jawab untuk menciptakan pengetahuan yaitu bidang Universitas. Kemudian berinteraksi dengan bidang ketiga yaitu Pemerintah. Ketiganya bekerjasama melalui pendekatan top-down agar tercipta inovasi yang dapat meningkatkan kondisi perkonomian suatu negara.

Triple Helix Kemudian dikembangkan lagi dengan yang ditambahkan dengan satu unsur, Civil Society atau komonitas yang menjadi *Quadruple Helix*, untuk mengakomodasi perspektif masyarakat. konsep *quadruple helix* dikembangkan dengan mempertahankan interaksi dari *triple helix* model (jaringan iptek antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah) serta melibatkan masyarakat sipil secara utuh dalam sistem.³² Indonesia sendiri model *Quadruple Helix* ini kemudian ditambahkan satu unsur lagi yaitu Media yang kemudian menjadi pelengkap Unsur pentahelix karena dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, Media (baik media konvensional maupun media sosial) memegang peran signifikan, meskipun tetap merupakan elemen yang independen atau tidak langsung terpengaruh oleh unsur-unsur yang lainnya dalam melaksanakan bagian atau fungsinya.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas maka bisa disimpulkan bahwa *Penta Helix* adalah model Inovasi yang digunakan dalam rangka untuk meningkatkan atau mengambangkan tingkat perekonomian suatu negara atau daerah yang didalamnya melibatkan lima stakholder yaitu pemerintah, pembisnis (swasta), media, akademika dan komonitas dimana kelima unsur tersebut mempunyai masing-masing peran dan pengaruh yang cukup besar dan

³² Yawson R. M., 2009, *The Ecological System of Innovation: A New Architectural Framework for a Functional Evidence-Based Platform for Science and Innovation Policy, The Future of Innovation Proceedings of the XXIV ISPIM 2009 Conference, Vienna, Austria, June 21–24*

berpengaruh sehingga apabila digabungkan dalam suatu kolaborasi dengan tujuan tertentu akan mendapat hasil yang lebih bagus dan maksimal.

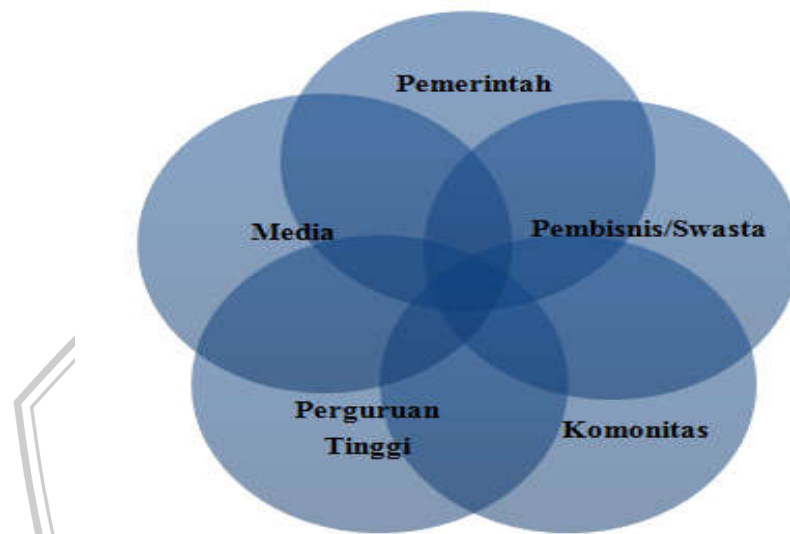
2.4.2 Kolaborasi Model Pentahelix di Indonesia

Penta Helix di Indonesia sendiri mulai dikembangkan pada 2016 melalui gagasan Menteri Pariwisata Arief Yahya dengan sinergitas GBCAM (*governance, bussines, comonity, akademy and media*) yang kemudian lima unsur ini akhirnya dijadikan salah satu model pengembangan pariwisata. Gagasan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Konsep Penta Helix sendiri dituangkan ke dalam Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. pada bab I Pendahuluan, bagian pengertian umum no 7 bahwa Ekosistem pariwisata adalah rekayasa kompleksitas fenomena kepariwisataan untuk menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan bahwa untuk menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan, maka diperlukan pendorong sistem kepariwisataan

melalui optimasi peran *bussiness, government, community, academic, and media* (BGCAM).³³Berikut Gambaran Model Pentahelix menteri Pariwisata Arief yahya:

Gambar 2.2

Kolaborasi model *Penta Helix* BGCAM



Sumber : Olahan Peneliti

Menurut Soemaryani Model pentahelix merupakan referensi dalam mengembangkan sinergi antara instansi terkait di dalam mendukung seoptimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan.³⁴ Hal itu bahwa kolaborasi pentahelix mempunyai peran penting untuk bermain di dalam mendukung tujuan inovasi bersama dan pentahelix berkontribusi terhadap kemajuan sosial ekonomi daerah. berikut peran masing-masing unsur *pentahelix* :

³³Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomer 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Jakarta : Kementerian Pariwisata

³⁴ Soemaryani Imas.2016. Pentahelix Model To Increase Tourist Visit To Bandung And Its Surrounding Areas Through Huan Resource Development. *Journal. Academy of Strategic Management*. Volume 15, Special Issues 3

1) Pemerintah

Pemerintah pada model *pentahelix* berperan sebagai regulator. Pemerintah berperan sebagai regulator sekaligus berperan sebagai kontroler yang memiliki peraturan dan tanggung jawab dalam mengembangkan objek. Dalam hal ini melibatkan semua jenis kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, promosi, alokasi keuangan, perizinan, program, Undang-Undang, pengembangan dan pengetahuan, kebijakan inovasi publik, dukungan untuk jaringan inovasi dan kemitraan publik-swasta. Pemerintah juga memiliki peran dalam mengkoordinasi para pemangku kepentingan yang berkontribusi pada pengembangan Kolaborasi tersebut.

2) Pembisnis

Bisnis pada model *pentahelix* berperan sebagai *enabler*. Bisnis merupakan entitas yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan.³⁵ Bisnis berperan sebagai *enabler* yang menghadirkan infrastruktur, dengan mendukung perubahan pada sumber daya manusia bussines dalam *kolaboratif governanc* eselain itu juga berperan sebagai promotor atau seumbangsi anggaran dalam memberikan nilai tambah atau pemasukan berupa pendanaan dalam pengembangan sektor tersebut.

3) Akademika

Akademisi pada model *pentahelix* berperan sebagai konseptor. Seperti melakukan standarisasi proses pada kegiatan yang dilakukan serta sertifikasi dan ketrampilan sumber daya manusia.³⁶ Akademisi dalam hal ini merupakan sumber

³⁵Slamet, R., Nainggolan, B., Roessobiyatno, R., Ramdani, H., &Hendriyanto, A. 2016. *Strategi Pengembangan UKM Digital dalam Menghadapi Era Pasar Bebas*.Jurnal Manajemen Indonesia, 16(2), hal 136

³⁶ *ibid.*

pengetahuan dengan penggunaan konsep, teori-teori terbaru yang relevan dengan kegiatan atau sektor yang dikembangkan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

4) Media

Media pada model *pentahelix* berperan sebagai *expenders*, dalam hal ini media berperan dalam mendukung publikasi dalam promosi dan membuat *brand image*. Dalam program pengembangan kerjasama tersebut. Media dapat dikatakan sebagai unsur yang cukup berpengaruh dalam pengembangan wisata, hal itu karena pengaruh perkembangan jaman yang sangat modern sehingga teknologi dan media merajai sehingga apa yang diisukan di media menjadi topik yang cukup berpengaruh dan menimbulkan efek yang sangat bagus dalam pariwisata.

1) Komunitas

Komunitas pada model *pentahelix* berperan sebagai akselerator. Dalam hal ini komunitas merupakan orang-orang yang memiliki minat yang sama dan relevan dengan bisnis yang berkembang³⁷. Komunitas juga bisa bertindak sebagai perantara atau menjadi penghubung antar pemangku kepentingan untuk membantu proses pengembangan sektor tersebut. Komunitas disini bisa termasuk komitas resmi ataupun masyarakat yang dimana mempunyai peran penting datang perkembangan kerjasama tersebut.

³⁷ ibid